

Jokowi Ingin Freeport 'Kalah' soal Divestasi Saham

Giras Pasopati , CNN Indonesia | Selasa, 09/01/2018 10:15 WIB



Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah ingin menguasai saham PT Freeport Indonesia dan berharap tidak kalah dalam proses divestasi saham. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah ingin menguasai saham PT Freeport Indonesia dan berharap tidak kalah dalam proses divestasi saham anak usaha Freeport McMoran di Amerika Serikat itu.

"Sudah tiga tahun kita negoisasi, alot banget. Enggak apa-apa alot, yang penting jangan kalah," ujar Presiden Jokowi dilandir dari situs Sekretariat Kabinet, Selasa (9/1).

Menurut Jokowi, sudah berpuluh tahun Pemerintah Indonesia hanya memperoleh 9,3 persen saham perusahaan tambang konsentrat tembaga dan emas di Kabupaten Timika, Papua itu.

Lihat juga:

[Izin Diperpanjang, Freeport Tagih Rekomendasi Ekspor](#)

"Saya sudah perintahkan minimal 51 persen. Minimal. Tapi tiga tahun juga belum rampung-rampung, haduh," ucap Presiden Jokowi.

Sebelumnya dalam pertemuan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, akhir Agustus 2017, yang dihadiri Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson telah sepakat melakukan divestasi 51 persen saham untuk kepemilikan nasional.

Namun, detil kesepakatan ini masih terus dinegosiasikan oleh pemerintah dan Freeport.

Sementara itu, setelah 50 tahun dikelola oleh perusahaan asing, pemerintah memastikan mulai Januari ini, pengelolaan migas di blok minyak dan gas bumi (migas) di Blok Mahakam sudah 100 persen kembali ke Ibu Pertiwi, dan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero).

Lihat juga:

[Pemerintah Kembali Perpanjang Izin Sementara Freeport](#)

"Saya serahkan kepada Pertamina. Dulu kita satu persen saja enggak punya saham di situ, sekarang 100 persen. Ini berikan ke Pertamina," kata

Semula Blok Mahakam dikuasai oleh PT Total E&P Indonesia (TEPI). Namun, kontrak mereka habis per 31 Desember 2017.

Pemerintah tidak memperpanjang izin pengelolaan blok atau Wilayah Kerja Mahakam, di Kalimantan Timur itu, dan memilih mengambil alih pengelolaan tersebut, dengan menyerahkannya kepada PT Pertamina Persero. **(gir)**